



Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam G20 Bali Leaders Declaration

Nur Selinda

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis Korespondensi: selindanur761@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze Indonesia's foreign policy in the G20 Bali Leaders' Declaration of 2022 by mapping national interests to understand the direction and priorities of Indonesian diplomacy amid complex global geopolitical dynamics. Employing a qualitative descriptive-analytical approach and the Rational Choice Theory framework, this research examines how Indonesia, as G20 Presidency, conducted rational calculations between domestic interests and external pressures—particularly regarding the Russia–Ukraine conflict. The findings reveal that Indonesia successfully embedded its national interests into four main dimensions: non-traditional security, strategic economy (energy transition, digitalization, food security), an inclusive global order, and ideological values rooted in the free and active principle. These were effectively integrated into the final declaration. Through an active-inclusive diplomatic strategy including shuttle diplomacy and carefully neutral diplomatic language Indonesia maintained consensus despite deep geopolitical polarization. This demonstrates that Indonesia's foreign policy during its G20 Presidency was the result of deliberate rational choice, not only addressing global challenges but also reinforcing its role as a credible middle power and bridge-builder. The study contributes theoretically to rationality-based foreign policy analysis and offers practical insights for future Indonesian multilateral diplomacy.*

Keywords: *G20 Bali Leaders' Declaration; Indonesia's Foreign Policy; Multilateral Diplomacy; National Interest; Rational Choice Theory.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam G20 Bali Leaders' Declaration tahun 2022 melalui pemetaan kepentingan nasional guna memahami arah dan prioritas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan kerangka teori Rational Choice Theory, penelitian ini menelaah bagaimana Indonesia sebagai negara presidensi melakukan kalkulasi rasional antara kepentingan domestik dan tekanan eksternal, khususnya terkait konflik Rusia–Ukraina. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memetakan kepentingan nasionalnya ke dalam empat dimensi utama pertahanan dan keamanan non-tradisional, ekonomi strategis (transisi energi, digitalisasi, ketahanan pangan), tatanan dunia inklusif, serta nilai ideologis berbasis prinsip bebas-aktif dan mengintegrasikannya ke dalam deklarasi final. Strategi diplomasi aktif-inklusif, termasuk shuttle diplomacy dan penggunaan bahasa diplomatik netral, memungkinkan Indonesia menjaga konsensus di tengah polarisasi global. Temuan ini membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 merupakan hasil pertimbangan rasional yang tidak hanya menjawab tantangan global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power dan bridge-builder yang kredibel. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam studi kebijakan luar negeri berbasis rasionalitas, sekaligus implikasi praktis bagi perumusan diplomasi multilateral Indonesia di masa depan.

Kata kunci: Diplomasi Multilateral; G20 Bali Leaders' Declaration; Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Kepentingan Nasional; *Rational Choice Theory.*

1. LATAR BELAKANG

G20 merupakan forum strategis global yang berperan penting dalam tata kelola ekonomi internasional, terutama sejak krisis keuangan global 2008 yang menuntut koordinasi kebijakan lintas negara (Larionova, 2023). Dalam perkembangannya, G20 tidak lagi semata-mata menjadi forum ekonomi, melainkan juga arena interaksi politik global yang sarat dengan kepentingan geopolitik negara-negara anggotanya (Acharya, 2022). Kondisi ini semakin kompleks ketika konflik Rusia–Ukraina mencuat dan memicu fragmentasi kepentingan antara

negara-negara Barat dan negara berkembang. Indonesia sebagai anggota G20 dan satu-satunya perwakilan Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan inklusivitas forum tersebut. Prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan utama Indonesia dalam menjalankan perannya di kancah multilateral, dengan menekankan dialog, kerja sama, dan penolakan terhadap polarisasi (Sundari, 2023).

Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 Bali 2022 menjadi ujian nyata bagi kapasitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Deklarasi Pemimpin G20 Bali 2022 yang terdiri atas 52 paragraf mencerminkan hasil kompromi politik yang kompleks di tengah perbedaan pandangan antarnegara anggota (Putra, 2022). Deklarasi ini tidak hanya memuat agenda pemulihan ekonomi global, tetapi juga mencerminkan kepentingan nasional negara tuan rumah dalam isu pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan ketahanan global (G20 Indonesia, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai studi terbaru turut menegaskan pentingnya analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks G20. Miranti et al., (2025) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi dan memperkuat citra diplomatik di tengah fragmentasi geopolitik. Dalam konteks representasi politik, Maksum (2025) menunjukkan bahwa framing media domestik terhadap keberhasilan Presidensi G20 turut memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia dan memperkuat persepsi publik terhadap efektivitas diplomasi nasional.

Sayangnya, penelitian tentang kepresidenan Indonesia di G20 masih tergolong minim dan belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Beberapa penelitian memang telah dilakukan seperti, Sundari (2023) menyoroti strategi diplomasi tanpa menelaah rasionalitas kebijakan luar negeri, Komarudin & Fadlillah (2024) fokus pada kepentingan nasional namun belum mengaitkannya dengan keputusan strategis Indonesia, Prasetyo (2023) membahas diplomasi ekonomi tanpa meninjau konteks politik global, Maksum (2025) menekankan framing media tanpa menyinggung aspek pengambilan keputusan diplomatik, dan Miranti et al., (2025) hanya menelaah arah kebijakan luar negeri tanpa mengintegrasikan hasil deklarasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara kepentingan nasional, strategi diplomasi, dan isi G20 Bali Leaders' Declaration melalui pendekatan Rational Choice Theory guna memahami rasionalitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pendekatan teoretis yang lebih terstruktur dan inovatif. Rational choice theory menjadi perspektif yang tepat untuk digunakan dalam konteks ini, karena mampu menjelaskan keputusan aktor negara sebagai proses kalkulasi rasional. Keohane mengadopsi Rational Choice Theory dalam kerangka Neoliberal Institutionalism, ia berpendapat bahwa negara bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya, tetapi juga menyadari pentingnya kerja sama melalui institusi internasional untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keuntungan kolektif. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Indonesia mengambil keputusan kebijakan luar negeri secara rasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya di forum multilateral G20, serta bagaimana diplomasi yang dijalankan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tekanan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menentukan judul penelitian “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam G20 Bali Leaders Declaration”.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis G20 Bali Leaders Declaration guna memahami posisi dan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral serta memetakan kepentingan Indonesia dalam G20 Bali Leaders untuk melihat arah dan prioritas kebijakan luar negeri.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Rational Choice Theory (RCT) sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 2022. Rational Choice Theory, yang berakar dari ekonomi neoklasik, mengasumsikan bahwa aktor sosial termasuk negara bertindak secara rasional dengan memilih tindakan yang memberikan hasil paling optimal berdasarkan preferensi mereka, di bawah kendala tertentu. Dalam konteks hubungan internasional, asumsi ini memungkinkan kita untuk memperlakukan negara bukan sebagai entitas monolitik yang impulsif, melainkan sebagai aktor strategis yang melakukan kalkulasi biaya-manfaat (cost-benefit analysis) sebelum mengambil keputusan.

Menurut Gilboa (2010), penjelasan berbasis pilihan rasional mencakup tiga elemen kunci: Feasible Set (Himpunan Pilihan yang Layak): Dalam diplomasi multilateral seperti G20, feasible set Indonesia sangat terbatas, ia tidak dapat memilih untuk mengucilkan Rusia tanpa merusak konsensus, tetapi juga tidak bisa mengabaikan tekanan Barat sepenuhnya; Preferensi dan Keyakinan Rasional: Preferensi Indonesia dalam G20 bersifat multidimensi yaitu menjaga netralitas sesuai prinsip bebas-aktif, mempromosikan agenda nasional, dan memperkuat reputasi sebagai pemimpin Global South; Kendala dan Informasi: Keputusan diambil dalam

kondisi bounded rationality (rasionalitas yang terbatas) oleh informasi yang tidak sempurna, tekanan waktu, dan sumber daya yang terbatas.

Kahler (1998) menjelaskan tentang penerapan RCT dalam studi hubungan Internasional. Dimana Kahler menggarisbawahi bahwa asumsi negara sebagai aktor tunggal sering kali menyesatkan. Dalam realitasnya, kebijakan luar negeri adalah hasil dari agregasi kepentingan domestik tarik-menarik antara presiden, kementerian luar negeri, kementerian keuangan, parlemen, dan bahkan kepentingan bisnis. Kahler juga membedakan antara Thin Rationality dan Thick Rationality. Thin Rationality adalah asumsi dasar bahwa aktor memaksimalkan utilitas berdasarkan preferensi yang stabil. Thick Rationality menjelaskan bahwa penambahan asumsi-auxiliary tentang isi preferensi tersebut (misalnya, apakah negara hanya mengejar kepentingan material atau juga normatif). Penelitian ini mengadopsi pendekatan Thick Rationality, dengan mendefinisikan preferensi Indonesia secara empiris melalui dokumen kebijakan resmi dan pernyataan para pejabat. Hal ini memungkinkan untuk menghindari kritik bahwa RCT adalah teori kosong yang hanya menjelaskan apa pun setelah kejadian (*ex post facto*) (Kahler, 1998).

Buku “Ekonomi Politik dan Pembangunan di Indonesia” oleh Hidayatullah & Edy (2021) memberikan konteks domestik yang krusial. Buku tersebut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi politik domestik. RCT sering dikritik karena mengabaikan faktor emosional, identitas, dan norma. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kahler (1998), RCT modern telah berkembang untuk mengakomodasi hal ini. Preferensi bukan merupakan sesuatu yang eksogen dan tetap, melainkan dapat dibentuk oleh norma, budaya, dan identitas nasional. Dalam kasus Indonesia, prinsip "bebas-aktif" bukan sekadar slogan, melainkan bagian integral dari identitas politik luar negeri. Preferensi untuk menjadi bridge-builder bukan sebuah pilihan instrumental semata, tetapi juga cerminan dari komitmen normatif terhadap perdamaian dan multilateralisme. Dengan demikian, RCT bukan hanya teori tentang "apa yang seharusnya dilakukan", tetapi alat yang dapat menjelaskan tentang "mengapa keputusan tertentu diambil" (Sato, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum G20 secara mendalam melalui analisis naratif, dokumen resmi, serta interpretasi terhadap konteks politik dan diplomatik yang melatarbelakanginya. Jenis penelitian deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak

hanya bertujuan menggambarkan fakta-fakta empiris mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga menganalisisnya dengan teori Rational Choice untuk memahami rasionalitas di balik keputusan diplomatik yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama masa presidensi G20.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan proses, bukan sekadar pengukuran angka. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah bagaimana Indonesia merumuskan kebijakan luar negeri dan memetakan kepentingan nasionalnya melalui forum multilateral G20, khususnya dalam Bali Leaders' Declaration tahun 2022.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum G20 pada Bali Leaders' Declaration tahun 2022. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kepentingan nasional Indonesia tercermin dalam isi deklarasi, serta rasionalitas diplomasi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tekanan eksternal dari kekuatan besar dunia. Peneliti mengambil Lokasi penelitian melalui studi pustaka untuk memperoleh data terkait arah, prioritas, dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum G20 Bali Leader's.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tekanan global dalam G20 Bali Leader's. G20 Bali Leader's membawa pengaruh yang besar terhadap arah kebijakan ekonomi, politik luar negeri, dan pembangunan nasional Indonesia, yang dimana dalam hal ini menjadi dasar untuk memetakan rasionalitas kebijakan luar negeri Indonesia untuk setiap keputusan Diplomatik dalam G20 Bali Leader's yang merupakan hasil kalkulasi rasional demi menjaga kepentingan nasional ditengah dinamika global.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini peneliti peroleh melalui studi pustaka (library research) melalui buku- buku, dokumen dan jurnal yang menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: pertama, studi kepustakaan (Library Research) digunakan untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, literature, catatan, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang ingin

dipecahkan (Creswell, 2014). Kedua, internet searching yang merupakan teknik pencarian data ataupun informasi riset yang dilakukan oleh peneliti melalui laman web resmi seperti website Kementerian Luar Negeri mengenai G20 Bali Leaders' dan melalui bacaan dari buku- buku referensi serta jurnal Internasional.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang digambarkan berdasarkan fakta yang ada. Setelah data diperoleh, data- data tersebut akan dianalisis, kemudian dijabarkan keterkaitan antara satu sama lain untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan terkait G20 Bali Leaders' sebagai objek kebijakan luar negeri Indonesia yang mencerminkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum G20 Bali Leaders' Declaration.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercermin dalam dokumen G20 Bali Leaders' Declaration tahun 2022, yang terdiri atas 52 paragraf dan memuat komitmen global di bidang ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta respons terhadap dinamika geopolitik Internasional (Putra, 2022). Dokumen ini dipandang sebagai instrumen diplomasi strategis yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merefleksikan kalkulasi rasional Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tekanan geopolitik global. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif diterjemahkan ke dalam bahasa dan substansi deklarasi, khususnya dalam konteks dilema diplomatik akibat konflik Rusia–Ukraina. Sejalan dengan Sundari (2023), diplomasi Indonesia dalam G20 menekankan inklusivitas, kesetaraan, dan pendekatan multilateral, serta memperkuat peran Indonesia sebagai bridge-builder antara negara maju dan berkembang (Sudiarto et al., 2024).

Lokasi penelitian dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menghimpun data dari dokumen resmi G20 Bali Leaders' Declaration yang diterbitkan Sekretariat G20 Indonesia (2022), jurnal ilmiah, buku, serta laporan institusi internasional. Sumber utama meliputi karya Komarudin & Fadlillah (2024), Prasetyo (2023), dan Maksum (2025), serta penelusuran basis data akademik seperti Google Scholar dan JSTOR, dan situs resmi Kementerian Luar Negeri RI serta IMF. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap konteks historis, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi presidensi Indonesia, tanpa keterbatasan geografis. Dengan demikian, lokasi penelitian dipahami sebagai konteks

institusional dan diplomatik tempat kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dijalankan dalam forum G20.

Gambaran Umum G20 Bali Leaders' Declaration

G20 Bali Leaders' Declaration merupakan dokumen final yang dihasilkan dalam KTT G20 ke-17 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 15–16 November 2022 (G20 Indonesia, 2022). Dokumen ini merepresentasikan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah dalam memfasilitasi dialog dan membangun konsensus di tengah situasi global yang ditandai oleh pandemi COVID-19, konflik Rusia–Ukraina, dan krisis ekonomi multidimensi. Dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, presidensi Indonesia menempatkan pemulihan ekonomi, ketahanan global, dan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda utama (Komarudin & Fadlillah, 2024).

Secara historis, G20 berkembang dari forum koordinasi teknis pascakrisis Asia 1997–1998 menjadi forum strategis tingkat kepala negara sejak krisis keuangan global 2008. Transformasi ini mencerminkan pergeseran tatanan dunia menuju multipolaritas, di mana negara berkembang memiliki peran yang semakin signifikan. Dalam struktur operasionalnya, G20 dijalankan melalui Finance Track dan Sherpa Track, serta melibatkan berbagai Engagement Groups yang memperkaya proses pengambilan keputusan secara inklusif (OECD, 2022).

Presidensi Indonesia berlangsung dalam konteks fragmentasi geopolitik yang tajam akibat konflik Rusia–Ukraina. Di tengah tekanan negara-negara Barat untuk mengisolasi Rusia dan penolakan negara berkembang terhadap politisasi forum, Indonesia menghadapi dilema diplomatik yang kompleks. Untuk merespons situasi tersebut, Indonesia mengadopsi strategi diplomasi aktif-inklusif, termasuk shuttle diplomacy Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow, guna menjaga netralitas sekaligus memastikan keberlanjutan forum (Hidayaturrahman & Edy, 2021). Hasilnya, G20 Bali berhasil menghasilkan deklarasi bersama dengan formulasi bahasa diplomatik yang netral dan kompromistis. Deklarasi ini memuat enam capaian utama, antara lain pembentukan pandemic fund, penguatan Resilience and Sustainability Trust IMF, komitmen transisi energi melalui JETP, serta perlindungan lingkungan dan ketahanan pangan global (IMF, 2023). Substansi deklarasi juga secara strategis mengintegrasikan kepentingan domestik Indonesia, seperti transisi energi, transformasi digital, dan stabilitas pangan, ke dalam agenda global (Razaq et al., 2022).

Dengan demikian, G20 Bali Leaders' Declaration tidak hanya menjadi simbol keberhasilan teknis presidensi Indonesia, tetapi juga mencerminkan rasionalitas kebijakan luar negeri yang mengombinasikan kepentingan nasional, komitmen normatif, dan tanggung jawab

global. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang kredibel, serta menegaskan pergeseran peran Indonesia dari rule taker menjadi rule shaper dalam tata kelola global abad ke-21 (Komarudin & Fadlillah, 2024).

Rasionalitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Presidensi G20 Bali 2022

Pembahasan ini bertujuan untuk mengelaborasi temuan penelitian terkait kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 Bali tahun 2022 dalam perspektif rasionalitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis terhadap G20 Bali Leaders' Declaration, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipahami sebagai hasil dari proses pertimbangan strategis yang memperhitungkan kepentingan nasional, tekanan geopolitik global, serta posisi Indonesia dalam struktur sistem internasional (Komarudin & Fadlillah, 2024).

Presidensi G20 Bali 2022 berlangsung dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, ditandai oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 serta meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia–Ukraina. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik internasional, tetapi juga memicu krisis energi, pangan, dan inflasi global yang menjadi perhatian utama negara-negara anggota G20 (Prasetyo, 2023). Dalam situasi ini, Indonesia menghadapi tekanan signifikan sebagai negara tuan rumah untuk mengambil sikap yang berpotensi memengaruhi legitimasi dan keberlanjutan forum G20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merespons kondisi tersebut dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif secara adaptif. Indonesia tidak memosisikan diri sebagai bagian dari blok kekuatan tertentu, melainkan mengambil peran sebagai fasilitator dialog dan penjaga konsensus. Strategi ini mencerminkan rasionalitas kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, baik bagi kepentingan nasional maupun bagi stabilitas sistem internasional secara keseluruhan (Sundari, 2023).

Analisis Rasionalitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia melalui Rational Choice Theory

Dalam kerangka Rational Choice Theory, negara dipahami sebagai aktor rasional yang bertindak berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat untuk memaksimalkan pencapaian kepentingannya di bawah berbagai kendala struktural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan untuk menjelaskan perilaku diplomatik Indonesia selama Presidensi G20 Bali 2022. Indonesia dihadapkan pada beberapa alternatif kebijakan, antara lain mengikuti tekanan negara-negara Barat untuk mengecualikan Rusia dari forum G20 atau mempertahankan inklusivitas forum dengan tetap melibatkan seluruh anggota. Setiap pilihan memiliki konsekuensi politik dan reputasional yang berbeda. Mengikuti tekanan Barat berpotensi meningkatkan hubungan dengan negara-negara G7, namun berisiko menurunkan

legitimasi G20 serta merusak citra Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan prinsip bebas aktif (Maksum, 2025).

Keputusan Indonesia untuk menggunakan bahasa diplomatik yang netral dalam G20 Bali Leaders' Declaration mencerminkan hasil kalkulasi rasional tersebut. Indonesia menilai bahwa potensi biaya akibat fragmentasi forum dan melemahnya kerja sama ekonomi global akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek dari keberpihakan politik tertentu. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 Bali dapat dipahami sebagai upaya memaksimalkan kepentingan nasional melalui stabilitas forum multilateral (Komarudin & Fadlillah, 2024).

Pemetaan Kepentingan Nasional Indonesia dalam G20 Bali Leaders' Declaration

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif memetakan kepentingan nasionalnya ke dalam substansi G20 Bali Leaders' Declaration. Kepentingan nasional dalam penelitian ini dipahami secara multidimensional, mencakup aspek keamanan, ekonomi, politik, dan ideologis (Habibah, 2022). Pemetaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar berperan sebagai penyelenggara teknis, melainkan sebagai aktor strategis yang membentuk arah agenda global.

Dimensi pertama adalah pertahanan dan keamanan non-tradisional, yang tercermin dalam komitmen terhadap penguatan sistem kesehatan global, ketahanan pangan, dan stabilitas energi. Isu-isu tersebut memiliki relevansi langsung terhadap kepentingan domestik Indonesia, mengingat dampak pandemi COVID-19 dan krisis global terhadap kondisi sosial-ekonomi nasional (Putra, 2022). Dimensi kedua adalah ekonomi strategis, yang meliputi pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 untuk mendorong isu-isu ini sebagai agenda kolektif, sekaligus memperkuat posisinya dalam tata kelola ekonomi global (Prasetyo, 2023). Dimensi ketiga adalah tatanan dunia inklusif, yang tercermin dalam peran Indonesia sebagai bridge-builder antara negara maju dan berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa diplomasi Indonesia di G20 berbasis pada prinsip inklusivitas dan kesetaraan antarnegara (Sudiarto et al., 2024). Dimensi keempat adalah nilai dan ideologi, yang menegaskan konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini tercermin dalam penekanan pada dialog, kerja sama multilateral, dan penyelesaian konflik secara damai dalam deklarasi final G20 Bali (Sundari, 2023).

Kalkulasi Strategis Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik Global

Konflik Rusia–Ukraina merupakan faktor eksternal yang paling signifikan memengaruhi dinamika Presidensi G20 Bali 2022. Negara-negara Barat secara aktif mendorong agar G20 mengambil sikap tegas terhadap Rusia, sementara sejumlah negara berkembang menolak politisasi forum yang berpotensi mengalihkan fokus dari isu ekonomi global (Komarudin & Fadlillah, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merespons dilema tersebut dengan melakukan kalkulasi strategis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas G20. Keputusan untuk tetap mengundang seluruh anggota G20 dan mendorong dialog inklusif mencerminkan rasionalitas adaptif Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik global (Maksum, 2025).

Strategi ini memungkinkan Indonesia menjaga konsensus dan memastikan tercapainya G20 Bali Leaders' Declaration, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam antaranggota. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 Bali dapat dipahami sebagai upaya rasional untuk meminimalkan risiko konflik institusional sekaligus menjaga relevansi G20 sebagai forum kerja sama ekonomi global (Prasetyo, 2023).

Implikasi Multilateral Diplomasi Indonesia sebagai Middle Power

Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam memimpin G20 Bali 2022 memiliki implikasi strategis bagi posisi Indonesia dalam sistem internasional. Indonesia semakin dipersepsikan sebagai middle power yang mampu menjalankan fungsi bridge-builder dan consensus builder di tengah fragmentasi geopolitik global (Sudiarto et al., 2024). Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian kebijakan luar negeri berbasis rasionalitas dengan menunjukkan bahwa rasionalitas negara tidak selalu bersifat instrumental, tetapi juga mencakup pertimbangan normatif dan institusional. Secara praktis, pengalaman Presidensi G20 Bali 2022 memberikan pelajaran penting bagi perumusan diplomasi multilateral Indonesia di masa depan, khususnya dalam menghadapi forum internasional yang semakin sarat dengan dinamika politik global (Komarudin & Fadlillah, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap G20 Bali Leaders' Declaration, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 merupakan kebijakan yang dirumuskan secara rasional dan strategis dalam merespons dinamika global yang kompleks. Indonesia tidak hanya menjalankan peran sebagai tuan rumah penyelenggara, tetapi juga bertindak sebagai aktor yang aktif membentuk arah pembahasan dan substansi kerja sama

multilateral dalam forum G20. G20 Bali Leaders' Declaration menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan isu-isu prioritas nasional ke dalam agenda global. Fokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta penguatan sistem kesehatan global mencerminkan upaya Indonesia dalam mengartikulasikan kepentingan nasional sebagai bagian dari kepentingan kolektif negara-negara anggota G20.

Dalam konteks geopolitik Internasional yang ditandai oleh konflik Rusia–Ukraina dan meningkatnya polarisasi kekuatan global, Indonesia menerapkan pendekatan diplomasi yang moderat dan inklusif. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif sekaligus menunjukkan kemampuan diplomatik dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan forum G20 di tengah tekanan politik internasional. Ditinjau dari perspektif Rational Choice Theory, kebijakan luar negeri Indonesia dalam Presidensi G20 Bali dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional. Negara menimbang berbagai alternatif kebijakan, keterbatasan struktural, serta konsekuensi politik, ekonomi, dan reputasional dari setiap pilihan guna memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, Presidensi G20 Bali tahun 2022 menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam memperkuat perannya sebagai middle power yang konstruktif dalam tata kelola global. Kebijakan luar negeri yang dijalankan melalui forum G20 tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat legitimasi internasional dan posisi strategis Indonesia dalam hubungan internasional jangka panjang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam Presidensi G20 Bali tahun 2022, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: pertama, saran teoretis penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian kebijakan luar negeri Indonesia dengan mengombinasikan Rational Choice Theory dengan pendekatan teoretis lain, seperti konstruktivisme atau pendekatan politik domestik. Penggunaan perspektif yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor ide, norma, dan dinamika internal negara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kedua, saran akademis bagi pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya studi kebijakan luar negeri dan diplomasi multilateral, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal dalam menganalisis peran Indonesia di forum internasional. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap presidensi G20 negara lain

atau menganalisis peran Indonesia dalam forum multilateral lainnya guna memperkaya khazanah keilmuan. Ketiga, saran praktis bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait, disarankan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan pendekatan diplomasi yang inklusif, moderat, dan rasional dalam forum multilateral. Keberhasilan Presidensi G20 Bali tahun 2022 dapat dijadikan sebagai model dalam kepemimpinan Indonesia pada forum internasional lainnya guna memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Apresiasi disampaikan kepada para dosen dan akademisi yang telah memberikan masukan serta arahan ilmiah selama proses penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Acharya, A. (2022). *A Multiplex World: The Coming World Order*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- G20 Indonesia. (2022). *G20 Bali Leaders' Declaration*. Sekretariat G20 Indonesia. <https://www.g20.org/en/media/documents/Bali-Leaders-Declaration.pdf>
- Gilboa, I. (2010). *Rational Choice*.
- Habibah, A. (2022). *G20 Bali Leaders' Declaration lentera dunia menuju pulih bersama*. https://www.antaranews.com/berita/3251521/g20-bali-leaders-declaration-lentera-dunia-menuju-pulih-bersama?utm_source.com
- Hidayaturrahman, M., & Edy, P. (2021). *Ekonomi Politik dan Pembangunan di Indonesia*.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: Resilience and Risks*. IMF Publications. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Kahler, M. (1998). *Rationality in International Relations*.
- Komarudin, U., & Fadlillah, S. (2024). INDONESIA'S G20 LEADERSHIP: NAVIGATING NATIONAL AMBITIONS ON THE GLOBAL STAGE. *Jurnal Review Politik (JRP)*, 14(2), 305–326.

- Larionova, M. (2023). G20 and Global Governance: Between Geopolitical Rivalries and Multilateralism. *Russian Journal of Global Affairs*, 21(4), 77–95.
- Maksum, A. (2025). Representing National vs Personal Agenda: Media Framing of Indonesia's G20 Presidency in 2022. *Global Communication Studies Journal*, 8(1), 33–58.
- Miranti, A., Akim, M., & Rachman, T. (2025). Indonesia's Foreign Policy in Organizing G20 Presidency in 2022. *Journal of Foreign Policy and Global Studies*, 9(1), 21–42.
- OECD (2022). *G20 / OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors*.
- Prasetyo. (2023). Indonesia's Strategic Engagement in G20: The Role of Economic Diplomacy in Advancing National Interests. *Journal of International Relations and Diplomacy*, 7(3), 88–104.
- Putra, A. (2022). *Jokowi: G20 Bali Leaders' Declaration terdiri atas 52 paragraf*. https://www.antaranews.com/berita/3247757/jokowi-g20-bali-leaders-declaration-terdiri-atas-52-paragraf?utm_source.com
- Razaq, A., Andika, B., & Lumumba, P. (2022). *MANDALA : Indonesia ' s Presidency On G20 2022 : Unpacking Its Digital Economic Diplomacy In Advancing Indonesian Msmes Digital Economic Transformation*
- Sato, Y. (2013). *Rational choice theory*
- Sudiarto, T. D., Triantama, F., & Pramono, B. K. (2024). *INDONESIA ' S G20 PRESIDENCY AND MIDDLE POWER DIPLOMACY: BUILDING BRIDGES BETWEEN DEVELOPED AND*. 75–95.
- Sundari, T. (2023). Strategi Diplomasi Indonesia dalam G20 di Bali. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*, 10(1), 12–28.